

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

IDENTIFIKASI CSF

Tujuan : "Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian Provinsi Jambi "

CSF 1

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan Kawasan Ekonomi Industri Belum Merata 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pertumbuhan Industri
<ul style="list-style-type: none"> Ekspor Non Migas Terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Ekpor Non Migas
<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya Daya Saing Produk Dalam Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri

CSF 2

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pertumbuhan Industri 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Perencanaan Dan Pembangunan Industri Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Ekpor Non Migas 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pengembangan Ekspor
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kemudahan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Meningkatnya Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

CSF 3

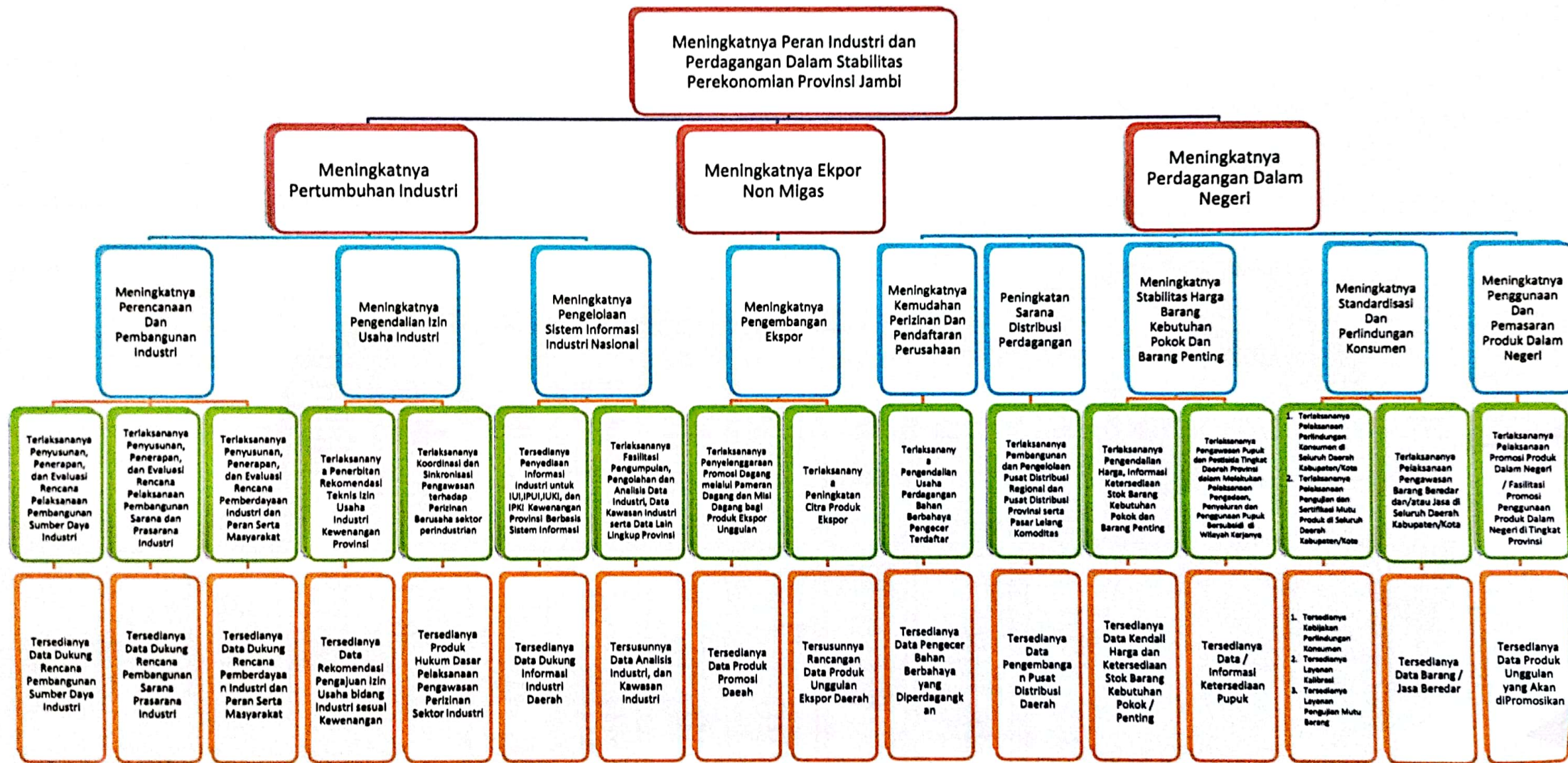
CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Perencanaan Dan Pembangunan Industri 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Industri Kewenangan Provinsi Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi

<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pengembangan Ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Peningkatan Citra Produk Ekspor
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kemudahan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri/ Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi

KERALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI



 MUBARTHA FUAD, M.Si
 212 199302 1 001
 PEMINTA UTAMA (10/4)



CASCADING KINERJA

ESS 2

Meningkatnya Peran Industri dan Perdagangan
Dalam Stabilitas Perekonomian Provinsi Jambi
IK :
1. Kontribusi Industri terhadap PDRB
2. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Meningkatnya Pertumbuhan Industri
IK :
1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB
2. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas

Meningkatnya Ekspor Non Migas
IK :
Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar)

Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri
IK :
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

ESS 3

Meningkatnya Perencanaan Dan Pembangunan Industri
IK :
Persentase pencapaian Perencanaan Sesuai Sasaran pembangunan Industri

Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri
IK :
Persentase Izin Sesuai Kewenangan yang Dikendalikan Pemda

Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
IK :
Persentase Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini

Meningkatnya Pengembangan Ekspor
IK :
Pertumbuhan Nilai Ekspor Unggulan

Meningkatnya Kemudahan Pertinanan Dan Pendaftaran Perusahaan
IK :
Persentase Pemberian rekomendasi Pertinanan & Pendaftaran

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
IK :
Persentase Peningkatan Nilai Hasil Transaksi Dari Lelang Komoditi

Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
IK :
1. Persentase stabilitas ketersediaan harga barang kebutuhan pokok
2. Persentase Laporan Pengawasan Penyakuran Pupuk Bersubsidi

Meningkatnya Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
IK :
1. Nilai UCLM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2. Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku
3. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen

Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
IK :
Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri

ESS 4 /
JAFUNG

Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
IK :
Jumlah Dokumen RPSDI yang disusun

Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
IK :
Jumlah Dokumen RPSPI yang disusun

Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
IK :
Jumlah Dokumen PIP

Rekomendasi teknis izin Usaha Industri Kewenangan Provinsi
IK :
Jumlah Rekomendasi teknis yang diterbitkan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian
IK :
Jumlah Perusahaan Sektor Industri yang Diaudit

Tersedianya Informasi Industri untuk IUI, LUP, LUK, dan IKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi
IK :
Jumlah Data dan Informasi Industri Berbasis SIINas

Terlaksananya Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi
IK :
Jumlah Dokumen hasil pendataan Industri

Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
IK :
1. Jumlah Pameran/Promosi/ Misi Dagang yang diikuti
2. Jumlah MOU Misi Dagang

Terlaksananya Peningkatan Citra Produk Ekspor
IK :
Jumlah kegiatan peningkatan citra produk ekspor

Terlaksananya Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Tendaftar
IK :
Jumlah Pengendalian Usaha Perdagangan

Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
IK :
Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi

Terlaksananya Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
IK :
Jumlah pemantauan ketersediaan barang pokok di tingkat Kabupaten/Kota yang dilakukan pengamatan Pusat distribusi

Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida dalam Pelaksanaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
IK :
Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengamatan Pupuk bersubsidi

Terlaksananya Pelaksanaan Perdagangan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
IK :
1. Jumlah Pembinaan Perdagangan Konsumen
2. Jumlah Pembinaan Perdagangan Konsumen
3. Jumlah Pembinaan Perdagangan Konsumen
4. Jumlah Pembinaan Perdagangan Konsumen

Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
IK :
Jumlah Pengawasan Barang beredar

STAF /
FUNGSIONAL

Tersedianya Data Dukung Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
IK :
Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Sumber Daya

Tersedianya Data Dukung Rencana Pembangunan Sarana Prasarana Industri
IK :
Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Sarpras

Tersedianya Data Dukung Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
IK :
Jumlah Dokumen Rencana Pemberdayaan Industri & Masyarakat

Tersedianya Data Rekomendasi teknis izin Usaha bidang Industri sesuai Kewenangan Provinsi
IK :
Jumlah Rekomendasi Teknis yg diterbitkan

Tersedianya Produk Hukum Dasar Pelaksanaan Perizinan Sektor Industri
IK :
Jumlah Kebijakan Pengawasan Perizinan

Tersedianya Data Dukung Informasi Industri Daerah
IK :
Jumlah Dokumen Informasi Industri

Tersedianya Data Analisis Industri, dan Kawasan Industri
IK :
Jumlah Dokumen Analisis Industri & Kawasan Industri

Tersedianya Data Produk Promosi Daerah
IK :
Jumlah Dokumen Produk Promosi Daerah

Tersedianya Rancangan Data Produk Unggulan Ekspor Daerah
IK :
Jumlah Dokumen Data Produk Ekspor Daerah

Tersedianya Data Pengecer Bahan Berbahaya yang Diperdagangkan
IK :
Jumlah Dokumen Data Pengecer

Tersedianya Data Pengembangan Pusat Distribusi Daerah
IK :
Jumlah Dokumen Data Distribusi Daerah

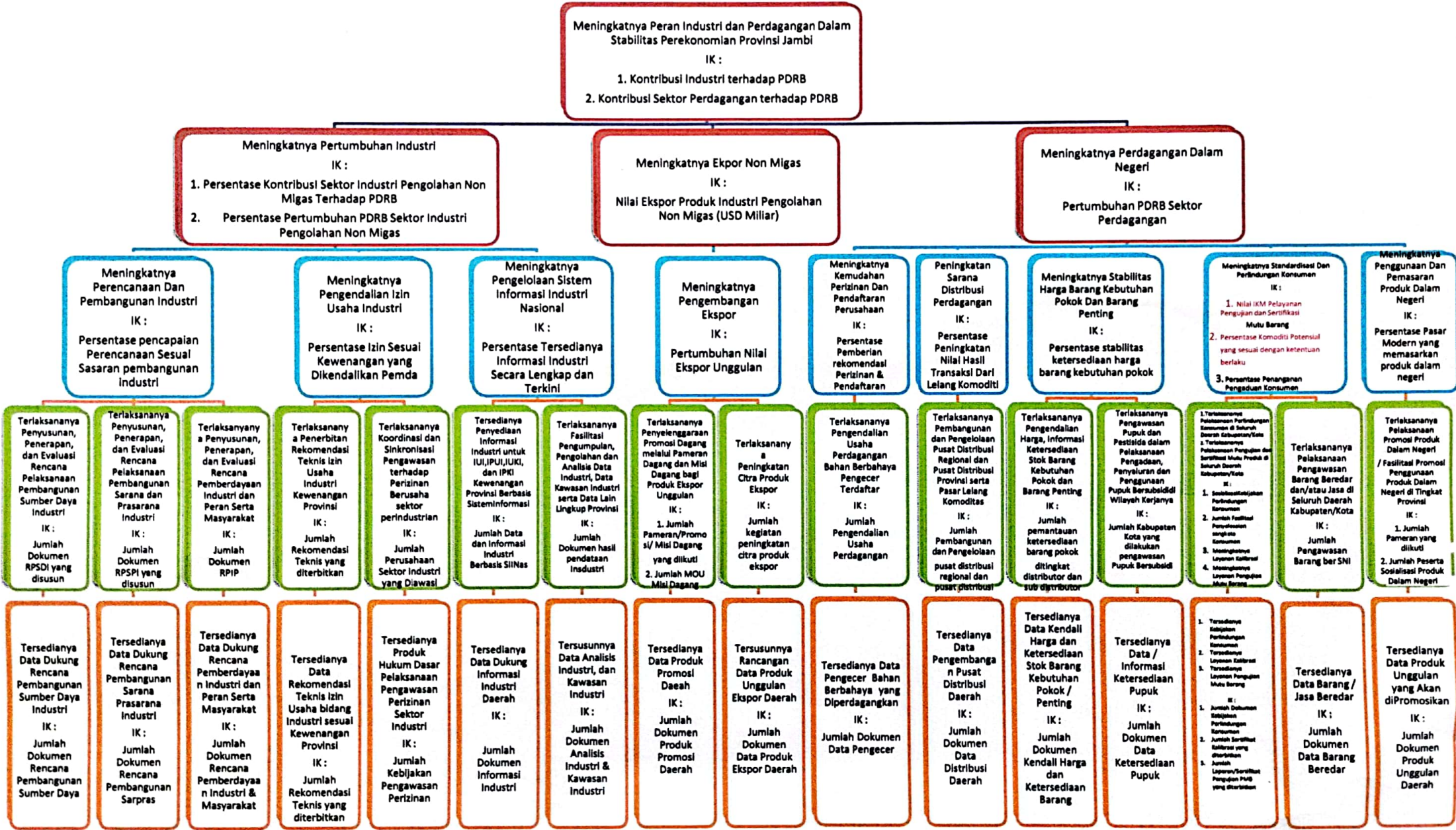
Tersedianya Data Kendali Harga dan Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok / Penting
IK :
Jumlah Dokumen Kendali Harga dan Ketersediaan Barang

Tersedianya Data / Informasi Ketersediaan Pupuk
IK :
Jumlah Dokumen Data Ketersediaan Pupuk

Tersedianya Data Barang / Jasa Beredar
IK :
Jumlah Dokumen Data Barang Beredar

Tersedianya Data Produk Unggulan yang Akan di Promosikan
IK :
Jumlah Dokumen Produk Unggulan Daerah

POHON KINERJA



Tujuan :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

IDENTIFIKASI CSF

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

CSF 1 :

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas implementasi Akuntabilitas Kinerja

CSF 2

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Layanan Penunjang Pelayanan Publik (Administrasi Keuangan, BMD, Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Adm Umum & Kepegawaian, Pengadaan BMD, Jasa Surat Menyurat, Pemeliharaan BMD)
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas implementasi Akuntabilitas Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

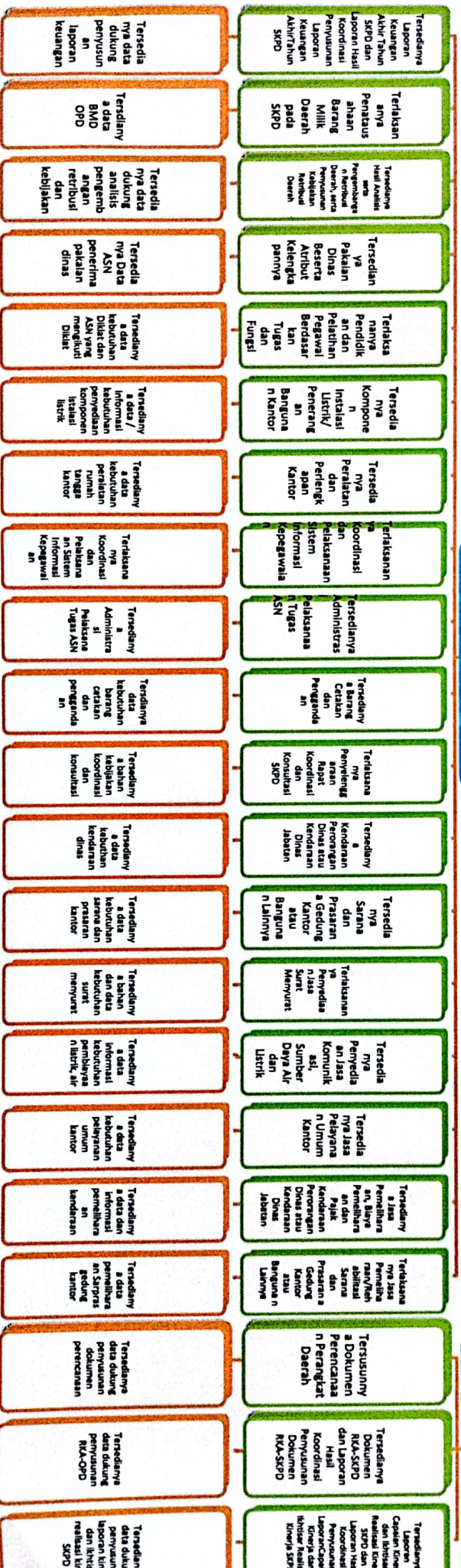
CSF CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Layanan Penunjang Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kuntabilitas Kinerja

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag

Nilai SAKIP



Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indeks RB OPD

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Rata-Rata IKM

Predikat Akuntabilitas Kinerja

1. Indeks / % keselarasan perencanaan
2. Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan

3. % tindak lanjut atas evaluasi kinerja

[illegible]

JAFUNG

Meningkatkan Kualitas Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

IK :

1. Indeks / % ketercapaian perencanaan
2. Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan
3. % tindak lanjut atas evaluasi kinerja

[illegible]